

BAB IV

REAKSI PARTAI SAREKAT ISLAM INDONESIA MELAWAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Pada akhir dasawarsa kedua perkembangan politik mengalami intensifikasi, tidak hanya karena terjadi pengetahuan politik kolonial tetapi juga karena ada peningkatan tuntutan politik serta meluasnya mobilisasi politik dikalangan rakyat.¹¹³

Dalam menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal, pemerintah kolonial merasa semakin terancam kedudukan serta otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi tersebut.¹¹⁴

Meskipun fokus aktivitas politik tetap ada pada organisasi pergerakan nasional, namun lewat saluran-saluran lain dilancarkan berbagai aksi pemogokan serikat sekerja dan serikat buruh, protes, deklarasi, dan lain sebagainya. Di samping itu bermunculanlah aktifitas dibidang ekonomi, sosial dan budaya, seperti pendirian koperasi, sekolah-sekolah, kursus-kursus, pusat latihan kesenian. Mulai disadari bahwa semua bidang kegiatan itu menjadi saluran yang berfungsi sangat instrumental untuk meningkatkan kesadaran nasional pada umumnya dan kesadaran politik khususnya. Hal ini akan lebih dirasakan manfaatnya terutama

¹¹³ Ibid., 144.

¹¹⁴ Ibid., 147.

dalam menghadapi pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul serta pengekangan kegiatan antara pemimpin dan aktivis pergerakan.¹¹⁵

Dalam hal ini penguasa kolonial menghadapi suatu dilema, pada satu pihak tidak dapat melarang keinginan berhimpun dan berkumpul, pada pihak lain berkembang ke arah pembentukan kekuasaan seperti diatas tidak dapat dicegah. Dari sikapnya yang reaktif itu maka senantiasa timbul pola kebijaksanaan yang reaksioner dan konservatif dalam arti yang sebenarnya. Suatu manifestasi dari politik reaksioner seperti itu ialah tidakan *Gubernemen* HB terhadap ketiga pemimpin *Indische Partij* sehabis berkongres yaitu Dowes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Gerakan pada bulan Juli 1918 dan isu mengenai adanya badan rahasia, yaitu yang terkenal dengan afdeling B dari CSI, maka HOS Tjokroaminoto dikenakan hukuman penjara dan meringkuk selama 10 bulan dalam tahanan. Tidak berbedalah nasib para pemuka golongan kiri, baik Belanda maupun Indonesia, yang satu per satu terkena aksi pembersihan pemerintah, antara lain dipecat dari pekerjaan atau diusir dari Hindia Belanda. Agitasi mereka menjadi kekuatan untuk memobilisasi rakyat kecil, termasuk kaum buruh. Gubernur Jendral Fock melakukan tindakan kepada para pemukanya Tan Malaka, Semaoen, Darsono secara berturut-turut dikenakan *internering* (1922-1923).¹¹⁶

Dengan adanya partai-partai yang radikal di Indonesia itu, pemerintah Belanda merasa khawatir akan dirobohkan; jangan sampai dinamakan

¹¹⁵ Ibid.,145.

¹¹⁶ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 149.

meninggalkan azas demokrasi oleh dunia Internasional, pemerintah Belanda menambah pasal 153 dari buku hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dengan pasal yang memberi hak kepada pemerintah Belanda menangkap dan menghukum mereka yang dianggap berbahaya terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Karena pasal kedua itu dapat ditafsirkan seluas-luasnya, tindakan-tindakan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu tidak berlainan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat fasis. Dengan ini pemimpin-pemimpin besar pergerakan nasional ditangkap dan diasingkan ditempat-tempat pengasingan di Digul dan tempat-tempat lainnya. Drs. Mohamad Hatta dan Sutan Syahrir diasingkan di Digul, sedangkan Ir. Soekarno diasingkan di Ende Kepulauan Flores.¹¹⁷ Dijatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan kepada Cokroaminoto dengan tuduhan keikutsertaan ketua PSI dalam gerakan *afdeling* B di Garut pada juli 1918.

A. Politik Hijrah

Di zaman penjajahan, ada perkumpulan yang bersikap non-kooperatif dan ada perkumpulan yang bersikap kooperatif terhadap pemerintah Hindia-Belanda.¹¹⁸ Perkumpulan yang bersikap non tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda sedangkan yang bersikap ko menganggap adanya manfaat untuk bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Tahun 1923 Agus Salim membawa partai Sarekat Islam dalam jalur non-kooperatif. Awalnya, menurut

Agus antara non-kooperatif, swadeshi, dan politik hijrah adalah sama ketika ia

¹¹⁷ Wirjosuparto, *Sedjarah Indonesia*, 107.

¹¹⁸ Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah*, 127.

bekata bahwa swadeshi akan menghasilkan non-kooperatif.¹¹⁹ Tapi kemudian Agus juga mengatakan “bahwa faham non-kooperasi dalam partai Sarekat Islam diganti dengan faham hijrah.”¹²⁰

Maksud dari pergerakan itu adalah dirubahnya sikap menolak kerjasama dengan pihak asing diganti menjadi “bekerjasama menyusun diri, menyebarkan suara dan mempersatukan buatan di dalam kalangan sendiri pada seluruh padang kehidupan pergaulan: sosial, ekonomi, dan politik. Dalam tahun 1925 Partai Sarekat Islam mempertegas politik Hijrahnya dalam kongres Sarekat Islam, berpendapat tidak ada gunanya untuk mengajukan mosi apapun juga terhadap pemerintah.¹²¹

Kebijakan ini ditekankan kembali pada tahun 1931, ketika pemerintah sebagai akibat dari tindakan penghematannya sehubungan dengan zaman krisis ekonomi mengeluarkan banyak pejabat-pejabat dan pegawai-pegawainya. Peningkatan pengangguran ini dalam tahun-tahun ini menyebabkan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam menunjuk kepada perlunya Hijrah dalam ekonomi dan politik. Demikianlah Swadeshi lagi-lagi ditekankan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, tetapi perlu dikemukakan dalam hubungan ini bahwa partai tidak melihat Swadeshi sebagai alat ampuh dalam menghadapi kapital asing. Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam mengakui kegunaanya di dalam bidang politik oleh sebab membantu memelihara semangat nasional, dan membantu membangunkan kehendak untuk mengadakan perusahaan nasional dengan pengharapan supaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁹ Noer, *Gerakan Modern Islam*, 160.

¹²⁰ *Ibid.*, 159.

¹²¹ *Ibid.*, 160.

sedikit-sedikit bisa mempunyai kapital bumi putra yang hidup. Dalam rangka inilah partai menyusun program krisis dan agrariannya dalam tahun 1933.¹²²

Swadeshi sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama Mahatma Ghandi dalam perjuangannya di India. Swadeshi merupakan pemboikotan pada barang-barang Inggris, segala tanda kehormatan Inggris, sekolah Inggris, dan pekerjaan Inggris.¹²³ Penerapan politik Swadeshi ini juga mendapat kritrik dari beberapa tokoh, misal Soekarno yang beranggapan bahwa politik Swadeshi tidak cocok bila diterapkan di Indonesia, dikarenakan perbedaan masyarakatnya. Masyarakat India sudah mengenal bangku sekolah sejak lama, jadi sangat wajar bila mereka sudah memiliki masyarakat industri yang harus dipertimbangkan oleh pihak penjajah, Inggris.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dimasa itu hanya 7% dari masyarakat Pribumi yang mampu baca tulis.¹²⁴ Pendidikan di Indonesia baru diterapkan pada masa politik etis, itupun hanya dikalangan para bangsawan, dan orang-orang kota di dalam lembaga pemerintahan atau perusahaan. Masyarakat pribumi hanya berperan sebagai buruh dan bila mereka mempunyai kualitas lebih baik akan menduduki pegawai tingkat rendah. Dan suatu lembaga atau industri lebih dikuasai oleh orang-orang Belanda, sedangkan perdagangan lebih dikuasai oleh orang Cina. Berbeda dengan Natsir dia beranggapan bahwa Partai Sarekat

¹²² Ibid., 161.

¹²³ Ridwan, "Isi Ajaran Mahatma Gandhi Untuk Kemajuan Gerakan Nasionalisme India", dalam <http://ridwanaz.com/umum/sejarah/isi-ajaran-mahatma-gandhi-untuk-kemajuan-gerakan-nasionalisme-india/> (28 Mei 2012)

¹²⁴ Muljana, *kesadaran Nasional*, 156.

Islam mampu mengikat masyarakat bawah, yaitu para petani dan kaum buruh dalam pergerakan Nasional.

Periode antara awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegrasian organisasi-organisasi nasionalis. Gubernur Jendral de Jonge tidak tanggung-tanggung secara konsekuen menjalankan politik “purifikasi” atau “pemurnian”, artinya penumpasan segala kecenderungan ke arah radikalisasi dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi.¹²⁵ Sementara itu, krisis PSII makin menghebat pada tahun 1934, partai Sarekat Islam cabang Sumatra Barat dilarang pemerintah untuk mengadakan rapat pada tahun 1936.¹²⁶

Program-program tersebut berpusat pada gerakan-gerakan tani dan Serikat buruh tetapi dalam bulan maret 1935 Salim sebagai ketua dari Dewan partai meminta kepada lajnah Tanfidziyah untuk meneliti kembali politik hijrah sehubungan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat oleh pemerintah pada tahun tersebut untuk menghadapi kegiatan partai politik yang bersifat non-kooperatif. Ia berpendapat bahwa oleh peraturan ini partai mungkin akan menjadi lumpuh dan oleh sebab itu ia mengemukakan perlunya meninggalkan politik Hijrah dan perlunya menjalankan politik kooperasi, pada akhirnya golongan kooperasi meninggalkan PSII, dan membentuk partai Barisan penyadar PSII. Abikusuno dan kawan-kawannya merasa perlu untuk membenarkan tindakan mereka terhadap anggota-anggota partai. Demikianlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹²⁵ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 176.

¹²⁶ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 157.

pada bulan April dan Mei 1937 diadakan rapat dari cabang-cabang partai, dimana pembenaran ini dijelaskan oleh pemimpin-pemimpin dari pusat partai. Sesuai hasil dari rapat akhirnya Agus Salim dikeluarkan. Sekitar masa itu pulalah sebuah publikasi khas tentang Hijrah, berupa brosur yang terdiri dari dua jilid, menampakkan diri. Brosur ini dikarang oleh SM. Kartosuwirjo tanpa lebih dahulu membicarakan isinya pada Abikusno.

Setelah menjelaskan arti jihad (perang dalam pengertian yang bukan terbatas semata-mata pada pengertian fisik saja), jihad ditafsirkan sebagai usaha bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh pada jalan Allah, pada jalan kebenaran dan pada jalan kenyataan dan ditujukan kepada jalan kebaikan, juga keinginan bersungguh-sungguh, maka yang bersungguh-sungguh yang berwujud persediaan, atau perjanjian atau kelengkapan dengan harta benda maupun dengan jiwa manusia, juga perbuatan yang berupa amal kebajikan atau amal soleh sekuat-kuat memberi keterangan-keterangan yang nyata memeriksa, memperhatikan, dan memikirkan dengan sungguh-sungguh, hati-hati dan teliti.¹²⁷ Jihad bukan berarti perang melainkan usaha bersungguh-sungguh yang berupa persediaan, persajian, atau kelengkapan, pada jalan Allah yang menuju ke arah kebenaran dan kenyataan, sepanjang ajaran agama Islam, jadi jihad dilihat sama dengan Hijrah. Brosur itu mengatakan bahwa Sarekat Islam melaksanakannya dengan menjadikan dirinya sebagai pusat latihan bagi orang-orang Islam dalam mempersiapkan diri pada suatu masa di depan, ketika mana mereka itu akan dipercayai untuk memimpin pemerintahan. Untuk keperluan ini persatuan segenap

¹²⁷ Noer, *Gerakan Modern Islam*, 165.

orang Islam di Indonesia serta juga di dunia pada umumnya dirasakan sebagai suatu keperluan. Partai, demikian dikatakan oleh Brosur itu seterusnya, tidak menginginkan untuk turut serta dalam dewan-dewan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, tetapi ia bersedia untuk memprotes segenap tindakan hukum atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, yang merusak bagi negeri ataupun bagi bangsa. Dalam rangka ini lagi-lagi masalah hijrah dan non-kooperasi dibedakan. Hijrah dilihat sebagai aksi yang positif, sebagai suatu usaha untuk membina kemampuan diri.

Brosur ini tidak membicarakan ini sama sekali oleh karena sebab dikatakannya “ini tidak berharga sedikitpun”. Memikirkan saja tentang masalah kooperasi atau non-kooperasi dengan pemerintah, kata brosur itu lebih lanjut, “sudah menimbulkan rugi, karena meninggalkan wajib”. Tetapi, walaupun segala macam penegasan dikemukakan tentang masalah politik Hijrah ini, masalah tersebut tidak juga terselesaikan. Pengarang dari kedua brosur itu, S.M. Kartosuwirjo, dipecat pada tahun 1939.¹²⁸ Dengan adanya segala macam pemecatan dalam tahun 1930-an itu dapat difahami betapa Sarekat Islam menjadi sangat lemah. Ini terjadi dalam akhir periode menjelang berakhirnya pemerintah Hindia Belanda.¹²⁹

Berdasarkan sikap bangsa Belanda yang angkuh dan ditambah pula oleh kemiskinan yang disebabkan oleh malaise yang menghebat sejak tahun 1932 hubungan antara bangsa Indonesia dengan Belanda sangat renggang. Ketika pada

¹²⁸ Ibid., 165.

¹²⁹ Ibid., 167.

tahun 1939 perang Dunia II itu pecah, rakyat Indonesia hanya mau membantu Belanda asal saja ada jaminan, bahwa akan diadakan pembaharuan dalam ketatanegaraan, seperti tuntutan supaya Dewan rakyat diganti bentuknya menjadi parlemen yang minta pertanggung jawaban dari Gubernur Jendral tentang jalannya pemerintahan di Indonesia. Permintaan ini yang dijalankan oleh aksi Indonesia berparlemen dibawah pimpinan Gapi ditolak pula dengan alasan bahwa dalam waktu genting meruncing itu, tidak pada tempatnya untuk mengadakan perubahan tata negara.¹³⁰

Keadaan di Indonesia sedemikian gentingnya disebabkan oleh meletusnya Perang Pasifik pada akhir tahun 1941. Untuk dapat bantuan dari bangsa Indonesia, pada tahun 1942 Ratu Wilhelmina sekali lagi memberi janji tentang pembaharuan-pembaharuan dalam susunan pemerintahan di Indonesia. Dengan cara mendekati orang-orang pemimpin Indonesia yang telah diasingkan, Belanda mencoba menggalang jalan kerjasama, Ir. Soekarno menolak.¹³¹

B. Politik Kooperatif

Dalam kongresnya yang kedua, yang diadakan pada tahun 1917 di Jakarta, telah terdengar adanya aliran kiri dalam tubuh Sarekat Islam. Aliran kiri itu disuarakan oleh Semaun, ketua Sarekat Islam lokal Semarang. Dan sebagai anggota pengurus besar ISDV paham sosialis belum mendapat dukungan dikalangan rakyat pada waktu itu. Oleh karena itu, sudah sejak mulai berdirinya para anggota ISDV berusaha merembes ke dalam tubuh perkumpulan yang

¹³⁰ Wirjosuparto, *Sedjarah Indonesia*, 112.

¹³¹ *Ibid.*, 114.

berhaluan nasionalis untuk dapat mendekati rakyat. Perkumpulan yang menjadi incaran adalah Partai Hindia dan Sarekat Islam. Semaun berhasil menyelundup kedalam Sarekat Islam. Sejak tahun 1877, Indonesia dijadikan tempat penanaman modal swasta Belanda akibat berjangkitnya paham imperialisme modern sebagai pengganti imperialisme kolot yang berupa penghisapan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat jajahan sejak berlakunya politik pintu terbuka tahun 1905, imperialisme modern itu berubah menjadi imperialisme nasional. Kapital asing dari berbagai negara, seperti Amerika, Inggris, Belgia, Italia, Prancis, Jerman, dan Jepang ditanam di Indonesia. Kekayaan Indonesia dikeruk dan diangkut ke luar, sedangkan tenaga rakyat dikuras untuk kepentingan kapital asing.

Hal ini semuanya diketahui oleh Semaun, Sarekat Islam didirikan atas pertimbangan ekonomis demi kepentingan nasional, sudah sewajarnya menentang kapital asing, yang jelas merugikan rakyat dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Sarekat Islam dipandang paling tepat untuk melancarkan serangan pada kapital asing. Kesempatan itu memang digunakan oleh Semaun.¹³²

Sementara itu, golongan Semaun terus berusaha menguasai Sarekat Islam, sehingga akhirnya terjadilah perpecahan dalam partai tersebut. Lebih-lebih setelah berdirinya PKI pada tanggal 23 Mei 1920, dan karena siasat Semaun yang disamping menjabat sebagai ketua PKI cabang Semarang, maka infiltrasi PKI ke dalam tubuh Sarekat Islam makin mendalam. Sebagai dampak dari infiltrasi komunis, maka dalam tubuh SI dan ormas-ormasnya dengan sendirinya timbul

¹³² Muljana, *Kesadaran Nasional*, 126-127.

perpecahan. Misalnya, Vaksentral yang semula didirikan oleh Sosrokardono sebagai pimpinan SI, terpecah menjadi dua yaitu:¹³³

- a. Vaksentral Revolusioner, berkedudukan di Semarang, yang dipimpin oleh Semaun dan Bergsma, di mana tergabung Sarekat Sekerja Kereta Api, kehutanan, Pelabuhan, dan Sarekat Sekerja Sopir dan kusir.
- b. Vaksentral yang berkedudukan di Yogyakarta dibawah pimpinan H. Agus Salim dan Suryopranoto dan yang beranggotakan Sarekat Sekerja Pabrik Gula, Pegadaian, Guru, dan pekerjaan umum.

Perpecahan itu tidak hanya terjadi di lingkungan vaksentral, akan tetapi juga dalam tubuh SI sendiri, hingga terjadi dua kelompok yaitu: kelompok pertama beraliran Marxisme-Leninisme yang diwakili oleh Semaun; kelompok kedua yang menganut aliran nasional keagamaan, di bawah pimpinan Tjokroaminoto. Berdasarkan prinsip “disiplin partai”, yang diputuskan dalam kongres IV pada tahun 1921, bahwa anggota SI tidak dapat merangkap menjadi anggota partai politik lainnya, maka Semaun dikeluarkan dari SI.

Sebagai reaksi terhadap keputusan tersebut, maka PKI memutuskan bahwa cabang-cabang SI yang berhaluan “merah”, dijadikan onderbouw dari PKI dengan nama Sarekat Rakyat. Sebagai konsekuensi dari sikap PKI itu, maka SI pecah menjadi dua partai yaitu:¹³⁴

¹³³ Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah*, 128.

¹³⁴ *Ibid.*, 130-131.

- a. Sarekat Islam berdasarkan nasional-keagamaan di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan berpusat di Yogyakarta.
- b. Sarekat Rakyat yang berhalauan Marxisme-Leninisme, di bawah pimpinan Semaun dan kawan-kawan.

Pada tahun 1930-an, timbul perbedaan pandangan politik di antara pemimpin SI. Hal itu menyebabkan timbulnya dua aliran, hingga mengakibatkan pecahnya SI kembali menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Aliran yang menegaskan pada asas agama, kelompok mana dipimpin oleh Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.
- b. Aliran yang menekankan pada asas kebangsaan di bawah pimpinan Dr. Sukiman dan Suryopranoto.

Konflik itu memuncak setelah dipecatnya Dr. Sukiman dan kawan-kawannya dan kemudian mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Partai Islam Indonesia (PARII).¹³⁵

Sepeninggal Cokroaminoto pada tanggal 17 Desember 1934, PSII dipimpin oleh Haji Agus Salim dalam kongres pada tanggal 8-11 Agustus 1924 di Surabaya, telah diputuskan bahwa Partai Sarekat Islam mengambil sikap non-kooperatif terhadap pemerintah meskipun sikap itu tidak sekeras sikap non-kooperatif perhimpunan Indonesia di Nederlands dan Partai Naional Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. Sudah sejak tahun 1922 Agus Salim menjadi anggota wakil *Volksraad* sebagai wakil Partai Sarekat Islam. Berhubung

¹³⁵ Ibid.

dengan keputusan kongres itu, ia berhenti sebagai anggota *volksraad*. Dalam tahun-tahun krisis, Partai Sarekat Islam Indonesia bergerak dalam bidang ekonomi demi perbaikan ekonomi rakyat yang sudah sangat parah. Sikap non-kooperatif dan dibarengi dengan asas *self-help* atau berdiri diatas kaki sendiri dirumuskan dengan kata “hijrah”. Demikianlah, dalam tahun-tahun krisis itu, Partai Sarekat Islam menjalankan politik Hijrah. Terbukti bahwa politik hijrah itu tidak banyak menolong penderitaan rakyat dan tidak banyak membantu perkembangan partai. Akibat keluar dari PPPKI, partainya menjadi terasing. Demikianlah, sikap non-kooperatif itu bagi partai Sarekat Islam Indonesia dirasakan sebagai kekangan dalam gerakannya. Dari pihak pemerintah tidak mendapat dukungan, dari pihak perkumpulan-perkumpulan kebangsaan tidak mendapat bantuan.

Agus Salim mengambil kesimpulan bahwa akibat sikap non-kooperatif itu, Partai Sarekat Islam Indonesia menempuh jalan yang salah. Pada tanggal 7 Maret 1935, ia mengusulkan kepada Dewan Partai untuk menghentikan sikap non-kooperatif. Usul itu dibicarakan dalam kongres partai Sarekat Islam Indonesia tahun 1935 di kota Malang. Usul peninjauan kembali sikap non-kooperatif itu menimbulkan bentrok antara yang setuju dan yang tidak setuju.¹³⁶

Demikian golongan kooperatif yang dipimpin Agus Salim meninggalkan Partai Sarekat Islam Indonesia. Abikusno dengan kawan-kawan yang mempertahankan sikap non-kooperatif, berganti mengambil alih pimpinan. Pada tanggal 28 november 1936, golongan Salim membentuk panitia yang diberi nama Barisan Penyadar Partai Sarekat Islam Indonesia yang diketuai oleh Mohammad

¹³⁶ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 158.

Roem. Panitia itu bermaksud untuk menginsafkan para anggota partai Sarekat Islam Indonesia bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan Abikusno Cokrosujoso tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap asas asli pendiri Sarekat Islam. Kebijakan itu adalah penyelewengan dari asas Sarekat Islam. Sikap non-kooperatif terbukti tidak memberi keuntungan apa-apa pada perkembangan partai, bahkan karena menjalankan politik hijrah, Partai Sarekat Islam Indonesia justru mengalami kemunduran. Karena bentrok itu tidak dapat didamaikan, pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia secara resmi memecat semua pengikut Agus Salim yang tergabung dalam barisan Penyedar Partai Sarekat Islam Indonesia pada tanggal 13 Februari 1937. Diantara tokoh-tokoh yang dipecat adalah Agus Salim, Sangaji, Mohammad Roem, Sabirin, dan Sjamsudin. Beberapa bulan kemudian, golongan Sukiman menggabungkan diri dengan partai Sarekat Islam Indonesia. Penggabungan diri partai Islam Indonesia ke dalam Partai Sarekat Islam Indonesia terjadi pada bulan Juli 1937.¹³⁷

Penggabungan diri Partai Islam Indonesia ke dalam Partai Sarekat Islam Indonesia tidak bertahan lama. Golongan Sukirman tidak puas dengan kedudukan yang diperoleh dalam Partai Sarekat Islam Indonesia. Alasan keluar lagi dari partai Sarekat Islam Indonesia adalah karena mereka tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh partai Sarekat Islam Indonesia, terutama mengenai politik hijrah.¹³⁸ Bagi golongan Sukiman, hijrah bukanlah asas perjuangan melainkan taktik. Taktik perjuangan dapat berubah dan harus menyesuaikan diri dengan suasana. Karena alasan itulah, golongan Sukiman keluar lagi dari Partai Sarekat

¹³⁷ Noer, *Gerakan Modern Islam*, 114.

¹³⁸ *Ibid.*, 159.

Islam Indonesia pada bulan Desember 1938 di kota Surakarta.¹³⁹ Partai Islam Indonesia berhaluan kooperatif; jadi berbeda dengan sikap dengan Partai Sarekat Islam Indonesia yang bermaksud menyempurnakan kedudukan agama Islam dan para pemeluknya di dalam masyarakat Indonesia.¹⁴⁰

Setelah golongan Salim dipecat dari keanggotaan partai Sarekat Islam Indonesia, nyatalah bahwa barisan penyadar Partai Sarekat Islam Indonesia tidak berhasil untuk menyadarkan pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia. Mereka kemudian membentuk partai baru yang bernama pergerakan penyadar. Pergerakan penyadar tetap bersikap loyal terhadap pemerintah dan mengharap kedudukan dalam *Volksraad*. Permohonan pergerakan penyadar kepada pemerintah – meskipun mendapat sokongan dari berbagai pihak– untuk memperoleh pengangkatan dalam *Volksraad*, tidak dikabulkan.¹⁴¹

Krisis Partai Sarekat Islam Indonesia ternyata masih tetap menghebat, pada tahun 1939, S. M. Kartosuwiryo menulis risalah tentang hijrah. Akibat penyebaran risalah hijrah itu, Kartosuwiryo dan pengikutnya dipecat dari keanggotaan Partai Sarekat Islam Indonesia. Pemecatan itu tidak diterima. Artinya, Kartosuwiryo dan kawan-kawannya tidak menyerah pada keputusan dewan partai. Bahkan, pada tanggal 24 Maret 1940, Kartosuwiryo dan kawan-

¹³⁹ Ibid., 160.

¹⁴⁰ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 60.

¹⁴¹ Ibid., 61.

kawannya malah mengadakan rapat umum di Malangbong dan membentuk Komite (panitia) Pertahanan Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia.¹⁴²

C. Kerjasama PSII dengan Partai-partai Lain

Perkembangan Sarekat Islam pra-kemerdekaan berlainan dengan organisasi Boedi Utomo, Sarekat Islam merupakan organisasi yang menyentuh semua lapisan masyarakat Pribumi seperti yang diinginkan sejak lama, SI dan dasar keagamaannya mempunyai potensi yang luar biasa untuk menghimpun pengikut diantara rakyat.¹⁴³

Menghadapi situasi yang demikian dinamik dan mengandung unsur-unsur revolusioner, pemerintah menempuh jalan sangat hati-hati, hasilnya adalah permohonan pengurus besar SI untuk dapat pengakuan badan hukum ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Keputusan yang keluar pada tanggal 30 Juni 1913 tersebut menjelaskan bahwa yang ditolak untuk menjadi perkumpulan yang berbadan hukum adalah SI sebagai suatu perkumpulan yang sentralistik, cabang-cabang SI sebagai organisasi tingkat lokal dapat diberi status badan hukum.¹⁴⁴

Organisasi ini memunculkan corak nasionalisme, ekonomi dan religius.¹⁴⁵
Disahkan badan hukum untuk SI-SI Lokal memiliki hak otonom. Sisi positifnya

¹⁴² Ibid., 162.

¹⁴³ Fadia Putri, "Sejarah Pergerakan Sarekat Islam", dalam [http:// www. Cermin Sejarah. Blogspot. Com/2008/06/Sejarah-pergerakan-Sarekat-Islam. Html](http://www.CerminSejarah.Blogspot.Com/2008/06/Sejarah-pergerakan-Sarekat-Islam.Html) (19 September 2014)

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

adalah semakin besarnya massa yang bergabung dalam SI, sedangkan sisi negatifnya adalah masuknya paham komunisme.¹⁴⁶

Pada mulanya, Eduard F.E. Douwes Dekker, mempengaruhi SI dengan ajarannya: “Indie Voor Indier” Eduard F.E. Douwes Dekker merupakan salah satu dari pendiri partai *Indische Partij*, partai ini tidak lama berdiri karena kemudian pemerintah melarangnya dan para pemimpinnya di Internir keluar negeri.¹⁴⁷

Orang lain yang mempengaruhi SI adalah orang Belanda, bekas anggota “*Sociaal Demokratische Partij*” di negeri Belanda, yang bernama Hendrik Sneevliet. Didirikannya “*Indische Sociaal-Demokratische Club*”, suatu partai politik yang bersifat kiri radikal (keras dan tegas). Tujuan Sneevliet adalah menarik orang Indonesia kepada cita-citanya dengan menyatukan faham Marxisme dengan cita-cita keislaman sebagian besar orang Indonesia. Dengan perantara seorang anggota SI dari wilayah Semarang, yang bernama Semaun, disebarkan faham Marxisme dikalangan anggota-anggota SI. Maka, dengan ajaran dari orang-orang Marxis itu orang Indonesia dalam SI mengetahui cara-cara mendirikan perserikatan- perserikatan buruh, menyelenggarakan pemogokan- pemogokan dan aksi- aksi revolusioner lainnya.¹⁴⁸

Dalam kongresnya yang keenam SI menekankan tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap, anggota SI harus memilih antara SI

¹⁴⁶ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 127.

¹⁴⁷ Sanusi, *Sedjarah Indonesia*, 102.

¹⁴⁸ *Ibid.*, 103.

atau organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun, usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara, saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan PERSIS pun turut dikeluarkan, karena disiplin partai tidak memperbolehkannya.¹⁴⁹

Setelah adanya disiplin Partai membuat partai SI menjadi setengah lumpuh. Keuntungan dari keluarnya tenaga-tenaga revolusioner adalah bahwa asas dan tujuan Sarekat Islam dapat diselamatkan dari penyelewengan golongan Semaun yang jelas menganut paham komunis internasional.¹⁵⁰ Selanjutnya, Disiplin Partai pada Muhammadiyah, suatu pertikaian dicatat antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah dalam tahun 1926, yang menyebabkan pihak Sarekat Islam mengambil langkah-langkah disiplin terhadap Muhammadiyah.¹⁵¹ Tahun 1927 SI melakukan kerjasama lagi dengan beberapa partai Indonesia yang lain, dengan bentuk kerjasama yang lain. PPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi seperti: PSI, Boedi Utomo, PNI, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, pemuda kaum Betawi, kelompok study Indonesia. PPPKI singkatan dari Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927.¹⁵²

¹⁴⁹ “Muhammadiyah” dalam [Http://id.Wikipedia.Org](http://id.Wikipedia.Org).

¹⁵⁰ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 131.

¹⁵¹ Noer, *Gerakan Modern Islam*, 152.

¹⁵² “Pemufakatan Perhimpunan- perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia”, dalam [http:// id.Wikipedia.Org/ wiki/ pemufakatan_perhimpunan-Perhimpunan politik kebangsaan Indonesia](http://id.Wikipedia.Org/wiki/pemufakatan_perhimpunan-Perhimpunan_politik_kebangsaan_Indonesia).

Latar belakang didirikannya PPPKI ini adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu Soekarno mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut, supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya.¹⁵³ Konsentrasi, PPPKI ini bertujuan sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Menyamakan arah kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dengan bekerjasama antar anggotanya.
2. Menghindarkan perselisihan antar anggotanya.

Atas dasar itu, maka di dalam konsentrasi itu tidak akan diperbincangkan masalah asas dan faham-faham partai yang bergabung. Dengan demikian, melalui PPPKI ini solidaritas antar organisasi yang menjadi tuntutan pokok dapat dilaksanakan.¹⁵⁵

Kongres PPPKI dilakukan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1928 di Surabaya, keputusan yang sangat penting dari kongres ini adalah mosi “ dari rakyat kepada rakyat”, dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan pergerakan. Dalam mosi ini dijelaskan tentang hal-hal berikut:¹⁵⁶

1. Dalam berpropaganda untuk organisasi sendiri, anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan asas-asas atau tujuan anggota yang lain.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Riki Hermansyah, “Pemufakatan Perhimpunan- perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia”, dalam <http://bloggericho.blogspot.com/2012/05/Sejarah-Pergerakan-nasional-Indonesia.html> (5 Mei 2012)

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Sanusi, *Sedjarah Indonesia*, 104.

2. Tidak boleh mempergunakan kata-kata yang sekiranya akan menyinggung perasaan orang lain.
3. Segala perselisihan antar anggota PPPKI harus diselesaikan dengan jalan perundingan.

Pada tanggal 25-26 Desember 1928 di Bandung, PPPKI mengadakan rapat, dan melahirkan mosi-mosi tentang UU berserikat dan berkumpul.¹⁵⁷ Pada masa itu untuk mendirikan suatu perserikatan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Pemerintah berdalih bahwa UU ini diberlakukan untuk menjaga *rust en orde*, keamanan dan ketertiban. Dijelaskan pula mengenai perserikatan yang terlarang yaitu jika pendiriannya dirahasiakan dan jika yang berwajib menerangkan bahwa perserikatan itu berlawanan dengan keamanan umum. Mosi itu juga menuntut pembentukan suatu penilaian untuk pengajaran (sekolah) kebangsaan. Tuntutan yang lain adalah pembebasan para interniren yang tidak berdosa di Digul.

Mosi itu juga menentukan agar pemerintah menyerahkan memorendum tentang peraturan *punale senctie*, terhadap kuli kontrak kepada Albert Thomas, ketua konferensi perburuhan Internasional, Genewa bila ia datang ke Indonesia (persatuan Indonesia 1 Juli 1928). Gerakan yang dilakukan PPPKI tidak hanya berhenti dari situ saja. Pada tanggal 29-30 Maret 1929, PPPKI melakukan konferensi di Yogyakarta, disusul dengan kongres Solo pada tanggal 25-27

¹⁵⁷ Ibid.,106.

Desember 1929.¹⁵⁸ Akibat gerakannya yang cukup berani, pemerintah melakukan penggeledahan terhadap anggota PNI, yang dinilai sebagai penggerak organisasi, karena sifat partai yang tegas bersifat non-kooperatif tanpa kompromi.

Partai Sarekat Islam telah menandatangani tujuannya yakni kemerdekaan nasional, dengan sendirinya partai Sarekat Islam menggabungkan dirinya dengan PPPKI. Akan tetapi dengan penggabungan itu, PPPKI tidak memberikan kesempatan baik untuk maju bagi PSI, bahkan malah sengketa yang diperoleh akibat pelontaran kritik dari pihak kawan¹⁵⁹ benih-benih keretakan telah nampak ketika permufakatan ini mulai berdiri. Pertentangan pun tidak dapat dielakkan lagi, sehingga pada bulan Desember 1930 PSI keluar dari PPPKI.¹⁶⁰

PPPKI adalah perhimpunan perkumpulan orang Indonesia asli yang bergerak ke arah kemerdekaan tanah air. Sedangkan partai SI mempunyai dasar yang lebih luas dari pada perkumpulan-perkumpulan bumi putera baik yang bergerak dalam bidang politik maupun dalam bidang sosial, karena PSI tidak membatasi keanggotaannya pada keaslian Indonesia, tetapi pada agama Islam. Perbedaan inilah yang dipakai sebagai alasan PSI untuk keluar dari PPPKI.¹⁶¹ Padahal awalnya, dalam rapat pembentukan PPPKI, telah disinggung tentang

¹⁵⁸ Riki Hermansyah, "Pemufakatan Perhimpunan- perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia", dalam <http://blogericho.blogspot.com/2012/05/Sejarah-Pergerakan-nasional-Indonesia.html> (5 Mei 2012)

¹⁵⁹ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 133.

¹⁶⁰ Riki Hermansyah, "Pemufakatan Perhimpunan- perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia", dalam <http://blogericho.blogspot.com/2012/05/Sejarah-Pergerakan-nasional-Indonesia.html> (5 Mei 2012)

¹⁶¹ Muljana, *Kesadaran Nasional*, 133.

adanya pasal bahwa hanya perkumpulan-perkumpulan Indonesia asli yang dapat menjadi anggota PPPKI.

Partai SI tidak keberatan terhadap pasal tersebut. Alasan yang sesungguhnya adalah serangan-serangan dari pihak PNI dan *Study Club* mengenai segi agama.¹⁶² Disamping itu juga, adanya perpecahan dalam partindo dan PNI baru. Meskipun kedua organisasi ini berasal dari PNI (lama), akan tetapi ketika Ir. Soekarno dan kawan-kawan di penjara, terjadilah dua kubu kekuatan yang satu dan lainnya tidak dapat dipersatukan kembali.¹⁶³

PPPKI berupaya mempertahankan diri baik dari keretakan dalam federasi maupun karena reaksi dari penguasa untuk mewujudkan cita-citanya, dalam bulan Mei 1931, dasar mufakat itu digantikan dengan dasar suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Perubahan dasar mufakat dengan suara terbanyak disahkan oleh kongres Indonesia Raya tanggal 1-3 Januari 1932. Kongres Indonesia Raya itu selain dihadiri oleh para utusan perkumpulan yang tergabung dalam PPPKI, juga dihadiri oleh utusan dari berbagai perkumpulan nasional, seperti Sarekat Ambon, partai Selebes, *Timorsch Verbond*, Partindo, Vak-Sentral persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Persatuan Kaum Kristen, dan Perkumpulan Politik Katolik Jawa, Partai Sarekat Islam pun ikut hadir.¹⁶⁴

¹⁶² Ibid., 133-134.

¹⁶³ Ibid., 134.

¹⁶⁴ Muljana, *Kesadaran nasional*, 138-139.

Konferensi bulan April 1932 itu mengumpulkan saran-saran untuk diolah sebagai bahan perubahan anggaran dasar. Pada tanggal 22 September 1932, rencana perubahan anggaran dasar dimasukkan dan pada bulan Mei 1933 rencana reorganisasi telah disahkan. Isinya adalah nama perhimpunan diganti kata “pemufakatan” diganti menjadi “persatuan” dan kata “kebangsaan” menjadi “kemerdekaan”, perubahan ini mempunyai arti yang penting: digantinya kata “pemufakatan” menjadi persatuan memiliki arti perubahan dasar mufakat dengan dasar suara terbanyak. Dan perubahan kata “kebangsaan” menjadi “kemerdekaan” mempunyai arti yang penting karena kata “kemerdekaan” mengandung tujuan gerakan dan membuka pintu lebih luas bagi perkumpulan-perkumpulan politik yang tidak membatasi keanggotaannya hanya sampai orang-orang Indonesia saja, seperti halnya dalam PSI.¹⁶⁵

Upaya-upaya itu diharapkan akan memperkuat pergerakan, sehingga dengan demikian berbagai partai politik yang ada tidak dipaksa untuk mufakat, melainkan diusahakan cara-cara yang demokratis sesuai dengan latar belakang tiap parpol. Adapun pemindahan majelis pertimbangan ke Jakarta, mengingat bahwa Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan tempat berdirinya berbagai organisasi pergerakan. Sedangkan hal yang terakhir adalah upaya PPPKI dalam rangka membela para pemimpin pergerakan yang pada masa itu diasingkan.¹⁶⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
¹⁶⁵ Ibid., 139.

¹⁶⁶ Riki Hermansyah, “Pemufakatan Perhimpunan- perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia”, dalam <http://www.bloggericho.blogspot.com/2012/05/Sejarah-Pergerakan-nasional-Indonesia.html> (5 Mei 2012)

Upaya-upaya Ir. Soekarno untuk memperbaiki dan mendorong aksi-aksi PPPKI tidak bisa dilakukan lagi, karena pada tanggal 30 Juli 1933, 5 bulan sebelum kongres Indonesia Raya (kongres direncanakan tanggal 22-25 Desember 1933), Soekarno yang sebenarnya pembangun dan pemberi semangat PPPKI, telah ditangkap oleh pemerintah dengan dalih demi keamanan dan ketentraman umum, berdasarkan peraturan pasal 47; Gubernur Jendral berwenang, dengan persetujuan Hindia-Belanda, demi keamanan dan ketentraman umum kepada orang yang lahir di wilayah Hindia-Belanda, memberikan tempat tertentu untuk menetap, atau melarang untuk tinggal disalah satu tempat di wilayah Hindia-Belanda. Kedua partai itu, Partindo dibawah Sartono dan pendidikan Nasional dibawah pimpinan Hatta dan Syahrir, yang pernah dipimpin oleh Soekarno, tidak dibiarkan hidup, tetapi langsung dilumpuhkan. Kedua partai itu dilarang mengadakan rapat. Dengan sendirinya, kedua partai bubar. Hatta dan Syahrir di tangkap dan diinternir ke Digul. Setelah penangkapan-penangkapan tersebut banyak partai yang merubah jalur politiknya menjadi kooperasi, salah satunya adalah PSI. Bulan Maret 1935, Salim sebagai ketua dari Dewan Partai meminta kepada lajnah Tanfidziah untuk meneliti kembali politik Hijrah. Sehubungan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat oleh pemerintah pada tahun tersebut untuk menghadapi kegiatan partai politik yang bersifat non-kooperasi. Ia mengemukakan perlunya meninggalkan politik hijrah dan menjalankan politik kooperasi. Akan tetapi saran ini tidak diterima oleh partai.¹⁶⁷

Kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan sikap pergerakan mencari format baru

¹⁶⁷ Noer, *Gerakan Modern Islam*, 161-162.

dalam mempersatukan partai-partai yang ada melalui gabungan politik Indonesia (GAPI).

Muhammad Husni Tamrin adalah penggagas federasi nasional ini untuk membina kerja sama antar partai politik. Pembentukan GAPI pada mulanya diusulkan oleh PSII pada awal April 1938, dengan pembentukan Badan Perantara Partai-partai Politik Indonesia (BAPE PPI). Namun, karena BAPEPPI tidak berjalan dengan baik, Parindra berinisiatif untuk membentuk kembali konsentrasi Nasional. Percepatan terbentuknya federasi ini dikarenakan oleh: kegagalan petisi Soetarjo, sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa dan semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat meningkatnya fasisme Nazi-Jerman.¹⁶⁸

Dalam fenomena ini, Parindra melihat bahwa perjuangan konsentrasi nasional harus mencakup dua sasaran yaitu: kedalam dapat menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk dapat memperoleh pemerintahan tersendiri; keluar dapat merubah pemerintahan Belanda untuk menyadari cita-cita bangsa Indonesia, kemudian melakukan perubahan dalam pemerintahan Indonesia.¹⁶⁹

Selanjutnya Parindra melakukan pendekatan dan perundingan dengan sejumlah partai dan organisasi seperti PSII, Gerindo, PII, paguyuban pasundan, persatuan minahasa, dan partai Katolik untuk membicarakan masa depan Indonesia. Tanggal 2 Mei 1939 terbentuklah GAPI sebagai organisasi kerjasama

¹⁶⁸ Delila Putri, "Gabungan Politik Indonesia dan Indonesia Berparlemen", dalam <http://dicolala.blogspot.com/2011/12/gabungan-politik-indonesia-gapi-dan.html> (13 Desember 2011)

¹⁶⁹ Ibid.

partai-partai politik dan organisasi.¹⁷⁰ Adapun tokoh-tokoh GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin (Parindra), Mr. Arif Syarifudin (Gerindo), Abikusno Cokrosuyoso (PSII).¹⁷¹

Walaupun awalnya tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada: hak untuk menentukan diri sendiri, persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.¹⁷²

Asas yang digunakan ialah penentuan nasib sendiri, kesatuan dan persatuan nasional, serta demokrasi dalam segi politik, sosial, dan ekonomi. Disini juga disetujui untuk mengadakan kongres rakyat dikemudian waktu. Dalam pengurusan sehari-hari dibentuklah kesekretariatan bersama yang diketuai Abikusno dan dibantu M. H. Tamrin, dan Amir Syarifudin.¹⁷³

Program kongkret yang dilakukan GAPI terwujud pada rapat 4 Juli 1939, di sini GAPI memutuskan untuk mengadakan kongres rakyat Indonesia yang akan

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, 36.

¹⁷² “Gabungan Politik Indonesia”, dalam [http:// Id. Wikipedia. Org/wiki/Gabungan politik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Gabungan_politik_Indonesia).

¹⁷³ Agus Rasiwan, “Makalah Sejarah Pergerakan Indonesia “Petisi Sutarjo & Indonesia Berparlemen ”, dalam [http:// Vivahistoria 121. Blogspot. Com/2014/09/makalah-sejarah-pergerakan-Indonesia. Html](http://Vivahistoria121.blogspot.com/2014/09/makalah-sejarah-pergerakan-Indonesia.html) (15 September 2014)

memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam aksi GAPI ini memiliki semboyan “Indonesia berparlemen.”

Saat Jerman melakukan penyerbuan ke Polandia pada 20 September 1939, GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan negara Belanda untuk bekerjasama menghadapi fasisme dimana kerjasama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam pemerintahan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, GAPI disokong oleh pers Indonesia yang memberitakan dengan panjang lebar dan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme. GAPI juga mengadakan rapat umum yang mencapai puncak pada 12 Desember 1939 dimana tidak kurang 100 tempat di Indonesia mengadakan propaganda tujuan GAPI. Jadi, saat itu Indonesia seakan bergemuruh dengan seruan Indonesia berparlemen.¹⁷⁴

Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pertama, 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya yaitu Indonesia Raya, bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-citanya dan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah Indonesia berparlemen penuh. KRI ditetapkan sebagai sebuah badan tetap GAPI, sebagai badan eksekutifnya. Keputusan lainnya dari kongres ialah penetapan bendera merah putih, dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.

Pada awal Januari datang jawaban dari menteri jajahan Walter, selaku menteri jajahan mengenai masalah aksi “Indonesia berparlemen”. Jawabannya

¹⁷⁴ Ibid.

berupa “tidak dapat dipenuhi keinginan rakyat Indonesia akan Indonesia berparlemen, karena rakyat Indonesia umumnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan perkumpulan-perkumpulan politik hanya mewakili sebagian kecil dari rakyat Indonesia.

Keadaan yang semakin genting menuntut kaum pergerakan menginginkan perubahan ketatanegaraan yang cepat dan jelas, pembentukan komisi Visman, yang didirikan pemerintah guna menjawab aksi Indonesia berparlemen dianggap dapat memperlambat, sebab akan membutuhkan pembahasan dan perdebatan. Belum banyak yang dilakukan oleh komisi Visman. Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat PD II, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan *inheemse militie* dan memperketat izin mengadakan rapat.¹⁷⁵

Keluar pernyataan dari ratu Wilhelmina pada 10 Mei 1941 dan diperjelas lagi dengan pidato Gubernur Jendral dalam pembukaan sidang *Volksraad*, yang intinya mengadakan larangan dan pembatasan-pembatasan tentang rapat-rapat dan konsultasi komite-komite parlemen. 14 Juni 1941 dikeluarkan peraturan pelarangan untuk kegiatan politik dan rapat tertutup, rapat lebih dari 25 orang dilarang. Tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbour mengetahui kejadian ini Mr. Sartono dan Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran agar rakyat Indonesia berdiri dibelakang Belanda untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁷⁵ “Gabungan Politik Indonesia”, dalam [http:// Id. Wikipedia. Org/wiki/Gabungan_Politik_Indonesia. Html.](http://Id.Wikipedia.Org/wiki/Gabungan_Politik_Indonesia.Html)

mempertahankan Hindia Belanda. Anjuran ini menimbulkan perselisihan yang menyebabkan Abikusno keluar dari MARI dan GAPI. Sebab anjuran itu dikeluarkan tanpa persetujuan dari anggota-anggotanya, perselisihan ini kemudian tertutup dengan keberhasilan Jepang dalam mengalahkan sekutu.

